

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan dalam rangka melaksanakan Trilogi pembangunan baik pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek maka pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Tax Reform yang diadakan di Indonesia membuat pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam pembangunan nasional.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi, adalah daerah yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT yang merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Salah satu pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kota

Kupang adalah pajak kendaraan bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Salah satu pajak daerah yang sangat menunjang adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan tulang punggung penerimaan pemerintah yang harus dimaksimalkan pelaksanaan pemungutannya agar dapat lebih optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan. Mengingat penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) kota kupang masih kurang optimal, yang disebabkan oleh masih banyaknya tunggakan kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga berdampak pada pendapatan pajak daerah. Tunggakan yang terjadi merupakan suatu pertanyaan bagi kita mengenai bagaimana sistem pemungutan dari pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh UPTD. Selain itu sistem pelayanan yang kurang optimal karena didukung oleh tenaga petugas yang kurang untuk melakukan pelayanan. Sejauh ini untuk data jumlah kendaraan bermotor masih sangat jauh untuk menunjukkan jumlah real kendaraan yang berkembang pada masyarakat saat ini. Pada hal pemungutan pajak kendaraan bermotor tergantung pada data basenya

Bertitik tolak dari peran masyarakat untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran PKB maka wajib pajak diharapkan dapat membayarnya tepat waktu. Tetapi kenyataannya dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang merupakan objek pajak di Kota Kota Kupang tidak seimbang

dengan realisasi penerimaan dan tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar PKB.

Hal ini jelas merupakan tantangan untuk Dispenda bersama Samsat untuk meningkatkan mutu dalam kinerja pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan sistem dan prosedur yang diharapkan semakin membaik, sehingga perlu dilakukan upaya yang intensif dan penegakan peraturan daerah yang tegas terhadap pemungutan pajak serta harus didukung dengan berbagai kebijakan yang memotivasi wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam hal ini mutlak diperlukan karena masyarakat memerlukan pelayanan yang terbaik dan disisilain merupakan sumber penghasilan daerah yang sangat potensial.

Penelitian terdahulu menurut Mokoginta (2015) dengan Judul Analisis Sistem DAN Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian terdahulu menurut Salmon (2015) mengenai perhitungan pencatatan pajak kendaraan Bermotor Roda Dua pada kantor Bersama Samsat Tondato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah sangat baik dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak kantor Samsat dapat menambahkan

fasilitas pelayanan agar dapat mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.

Tujuan Penulis Melakukan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang tahun anggaran 2019- 2021 pada DISPENDA Kota Kupang Metode Deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Pemungutannya sudah berjalan efektifitas dan pembagian tugas yang sudah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang”.

1.3. Persoalan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang?
2. Bagaimana Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan persoalan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi pengumutan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademis, diharapkan agar menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat membantu dalam penyelesaian penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Daerah Kota Kupang. Untuk meningkatkan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Kupang.

- a. Bagi penelitian, hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang dipelajari khususnya akuntansi perpajakan.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.